



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BULELENG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2025. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat yang disusun sesuai mekanisme Pelaporan dalam Surat Edaran Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 055/03/V/KI.Bali/2025 tentang Format Laporan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR..... 2

DAFTAR ISI..... 3

BAB I 4

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 4

BAB II 6

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK..... 6

BAB III 14

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK..... 14

BAB IV..... 16

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK..... 16

BAB V..... 17

KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 17

BAB VI..... 18

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 18

BAB VII..... 19

PENUTUP 19

LAMPIRAN

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Di era digital saat ini, kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat dan transparan semakin meningkat. Ada beberapa alasan mengapa keterbukaan informasi publik menjadi sangat penting, salah satunya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Keterbukaan informasi memungkinkan publik mengetahui proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program pemerintah. Hal ini mendorong pemerintah untuk bertindak secara transparan dan bertanggung jawab. Penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Selain itu, informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat memberikan masukan, kritik, atau saran yang konstruktif untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi. Era digital memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk memenuhi hak ini melalui berbagai platform, seperti website resmi, aplikasi, dan media sosial. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi
- b) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan/*proporsional*

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap Keterbukaan Informasi Publik dan wujud pernyataan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mengimplementasikan amanat UU tersebut dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dengan keterbukaan informasi menjadikan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan, dan akuntabel.

1.2 Kebijakan Badan Publik terhadap Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan sejumlah kebijakan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik. Kebijakan tersebut disusun dan dilaksanakan dengan berpedoman pada Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut, PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyusun dan menetapkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/247/HK/2025 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Surat Keputusan ini menjadi dasar hukum dalam penetapan struktur organisasi serta pembagian tugas dan tanggung jawab pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Selanjutnya, pada tahun 2025 PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyusun Peraturan Bupati Buleleng Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Peraturan Bupati tersebut disusun sebagai pedoman operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik agar dilaksanakan secara terkoordinasi, terstandar, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Selain itu, pada tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng selaku PPID Pelaksana juga telah menyusun Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 500.12.18.1/0012.3/PLIP.KOMINFOSANTI/I/2025 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.

Melalui penetapan berbagai kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sebagai bagian dari upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB II

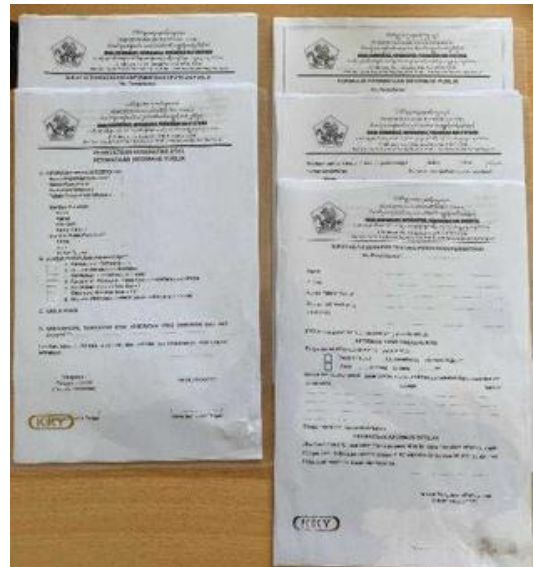
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, ketersediaan sarana prasarana menjadi elemen penting yang memastikan pelayanan dapat berjalan secara efektif. Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan Informasi Publik yang optimal, Pemerintah Kabupaten Buleleng menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:

a) Ruang Pelayanan Informasi Publik

Ruangan ini merupakan ruangan khusus yang disediakan untuk melayani permintaan informasi oleh masyarakat yang dilakukan secara *offline*, dilengkapi dengan meja layanan, tempat duduk, serta berbagai formulir pendukung dalam layanan informasi publik. Berikut ruang Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan dilengkapi formulir pendukung



b) Website Resmi PPID Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki 2 (dua) website yang dapat diakses oleh publik, yaitu website Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan alamat link berikut <https://bulelengkab.go.id/> serta website PPID Kabupaten Buleleng, dengan alamat link berikut <https://ppid.bulelengkab.go.id/>.

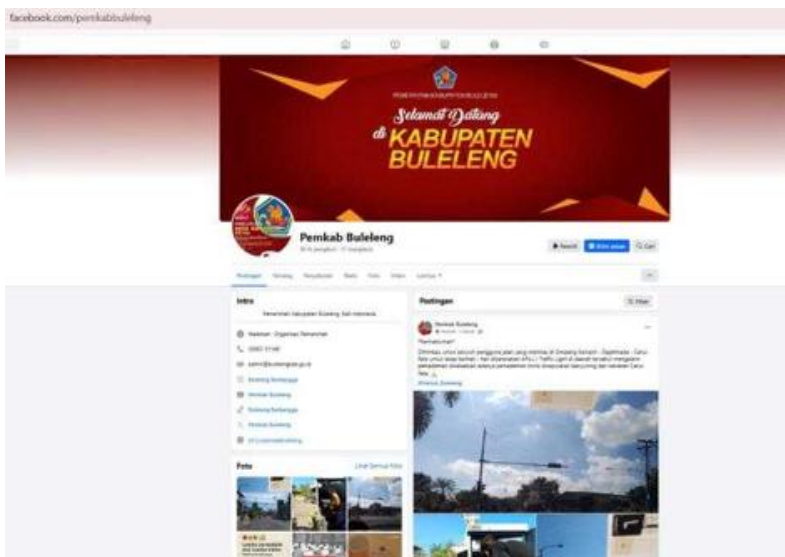
Website PPID Kabupaten Buleleng menyediakan berbagai informasi, diantaranya profil PPID, daftar informasi publik, serta informasi lain sesuai tugas dan pokok dan fungsi. Selain itu masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara *online*, melalui alamat link berikut <https://ppid.bulelengkab.go.id/permohonan>

c) Media Sosial Resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng

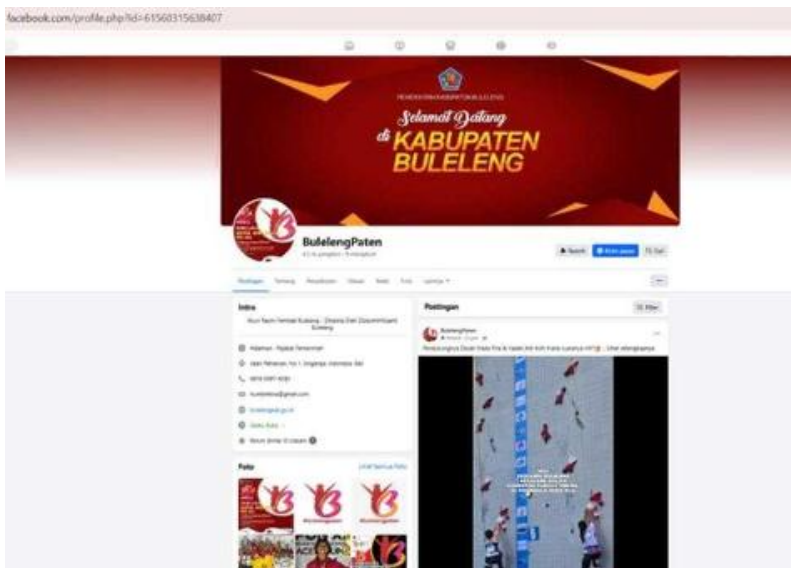
Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki berbagai media sosial aktif yang digunakan untuk menyebarkan informasi. Berikut berbagai media sosial resmi dari Pemerintah Kabupaten Buleleng

1) Facebook

Pemkab Buleleng : <https://www.facebook.com/pemkabuleleng>



Buleleng Paten : <https://www.facebook.com/profile.php?id=61560315638407>



2) Instagram

Buleleng Paten:

<https://www.instagram.com/bulelengpaten/?igsh=dzNydXBzaG85YW0w>



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara

3) X

Pemkab Buleleng : https://x.com/Pemkab_Buleleng



4) TikTok

Buleleng Paten : <https://www.tiktok.com/@buleleng.paten>



5) Youtube

Pemkab Buleleng : <https://www.youtube.com/@pemkabbuleleng>



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara

d) Kanal Pengaduan Resmi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menyediakan beberapa kanal resmi untuk masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik ataupun permasalahan lainnya. Berikut saluran pengaduan resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng, diantaranya

1) SP4N-LAPOR!

SP4N-LAPOR! adalah platform nasional yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan Masyarakat. SP4N-LAPOR! dapat diakses melalui website dengan alamat : www.lapor.go.id ataupun dapat mengunduh aplikasi SP4N-LAPOR! di Google Play Store atau App Store.

2) WBS (Whistleblowing System)

Whistleblowing System (WBS) adalah saluran resmi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Buleleng. WBS (Whistleblowing System) dapat diakses melalui website dengan alamat <https://wbs.bulelengkab.go.id/>

2.2 Sumber Daya Manusia

Pelayanan Informasi Publik yang optimal tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelolanya. SDM yang kompeten, profesional, serta memiliki pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik merupakan faktor penting dalam mendukung terselenggaranya pelayanan informasi publik yang efektif dan berkualitas.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng dilaksanakan oleh SDM yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/247/HK/2025 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng, diantaranya yakni

a) Pembina dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati

b) Pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah

c) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah, dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

d) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dijabat oleh

1. Sekretaris pada perangkat Daerah;

2. Kepala Bagian pada Sekretaris Daerah;

3. Kepala Bagian yang membidangi informasi dan komunikasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Kepala Bagian yang membidangi informasi dan komunikasi pada Rumah Sakit Umum Daerah;

5. Wakil Direktur pada Badan Usaha Milik daerah yang membidangi Sumber Daya Manusia dan Kehumasan

e) Tim Pertimbangan dijabat oleh:

1. Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah;
2. Para Kepala Perangkat Daerah;
3. Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah

f) Bidang Pendukung, terdiri dari:

1. Bidang Pendukung Sekretariat;
2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

Selanjutnya, pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng dilaksanakan oleh SDM yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 500.12.18.1/0012.3/PLIP.KOMINFOSANTI/II/2025, diantaranya yakni

a) Atasan PPID dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

b) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dijabat oleh Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

c) Bidang Pendukung, terdiri dari:

1. Bidang Sekretariat, dengan koordinator Ksb. Umum dan Keuangan;
2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, dengan koordinator Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
3. Bidang Pelayanan Informasi Publik, dengan koordinator Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dengan koordinator Kepala Bidang Persandian dan Statistik

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran yang memadai demi mendukung keterbukaan informasi publik. Dengan dukungan anggaran yang terencana dan transparan, diharapkan pelayanan informasi publik dapat berjalan secara maksimal, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan terkait PPID di Pemerintah Kabupaten Buleleng dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025. Anggaran tersebut meliputi kegiatan pelayanan informasi publik sebesar Rp 233.566.453; kegiatan monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik sebesar Rp 51.178.709; pengelolaan media komunikasi publik sebesar Rp1.894.931.067; penyusunan konten (Pameran) sebesar Rp 522.214.130; pengelolaan nama domain dan sub domain penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan nama domain pemerintah desa sebesar Rp 4.642.015.349; penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp

255.278.052; penyelenggaraan Statistik Sektorial yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia sebesar Rp. 30.469.400

2.4 Daftar Informasi Publik

Masyarakat dapat mengakses informasi publik melalui portal resmi PPID Kabupaten Buleleng, dengan alamat <https://ppid.bulelengkab.go.id/informasipublik>

2.5 Daftar Informasi Dikecualikan

Masyarakat dapat mengakses informasi publik dikecualikan melalui portal resmi PPID Kabupaten Buleleng, dengan alamat <https://ppid.bulelengkab.go.id/informasipublik/dikecualikan>

2.6 Standar Operasional Prosedur

Guna mempercepat pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, PPID menetapkan 9 (sembilan) SOP yang dapat diakses melalui alamat link berikut <https://ppid.bulelengkab.go.id/dokumendanlaporan/sop> . 9 SOP itu terdiri dari

- 1) SOP Pelayanan Informasi Publik
- 2) SOP Penyusunan Daftar Informasi
- 3) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
- 4) SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
- 5) SOP Fasilitasi Sengketa Informasi
- 6) SOP Pendokumentasian Informasi Publik
- 7) SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik
- 8) SOP Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik
- 9) SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

2.7 Inovasi Layanan

Dalam rangka mewujudkan akses layanan publik terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng berinovasi membuat sebuah platform yang dinamakan “SINGA PINTER”. SINGA PINTER merupakan platform digital terpadu yang dibuat untuk menggabungkan berbagai layanan publik ke dalam satu sistem. Tujuan utamanya adalah memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan pemerintah secara cepat, mudah, dan efisien. Masyarakat dapat mengakses SINGA PINTER melalui website dengan alamat <https://singapinter.bulelengkab.go.id/>



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara

2.8 Prestasi Badan Publik

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Nomor 325/01/XII/KI.BALI/2025 tentang Hasil Monitoring Pada Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Se Bali Tahun 2025, sebagai berikut:

No	Nama Badan Publik	Nilai	Kualifikasi
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik	92,77	INFORMATIF
2	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	97,25	INFORMATIF
3	Dinas Kebudayaan	96,65	INFORMATIF
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	94,63	INFORMATIF
5	Badan Riset dan Inovasi Daerah	94,38	INFORMATIF
6	Satuan Polisi Pamong Praja	92,35	INFORMATIF
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	91,68	INFORMATIF
8	Dinas Perhubungan	90,10	INFORMATIF
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	90,05	INFORMATIF
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	90,00	INFORMATIF
11	Dinas Sosial	78,08	CUKUP INFORMATIF
12	PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Buleleng 45	82,74	MENUJU INFORMATIF
13	Kecamatan Buleleng	80,09	MENUJU INFORMATIF
14	Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng	82,55	MENUJU INFORMATIF
15	Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng	90,03	INFORMATIF
16	Desa Panji, Kecamatan Sukasada	52,47	KURANG INFORMATIF

2.9 Bentuk Partisipasi Kegiatan

Bentuk partisipasi Pemerintah Kabupaten Buleleng, diantaranya

1. Hari Hak Untuk Tahu

Facebook : <https://www.facebook.com/share/p/17yvEjP6hh/>



Instagram :

<https://www.instagram.com/p/DPH5vTxkw8C/?igsh=bXp6YjdzdmlzZGRn>

2. Hari Ulang Tahun Komisi Informasi

Facebook : <https://www.facebook.com/share/v/1BpxSiBNTH/>



Instagram :

<https://www.instagram.com/reel/DKdUiVeM5Pt/?igsh=MXJoaXRzYWpnYjhwaQ>



Facebook : <https://www.facebook.com/share/p/17hf2or3X2/>



Instagram :

<https://www.instagram.com/p/DKdZnoyEr9/?igsh=MXNpZHVwYmZpbWh0bw==>



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

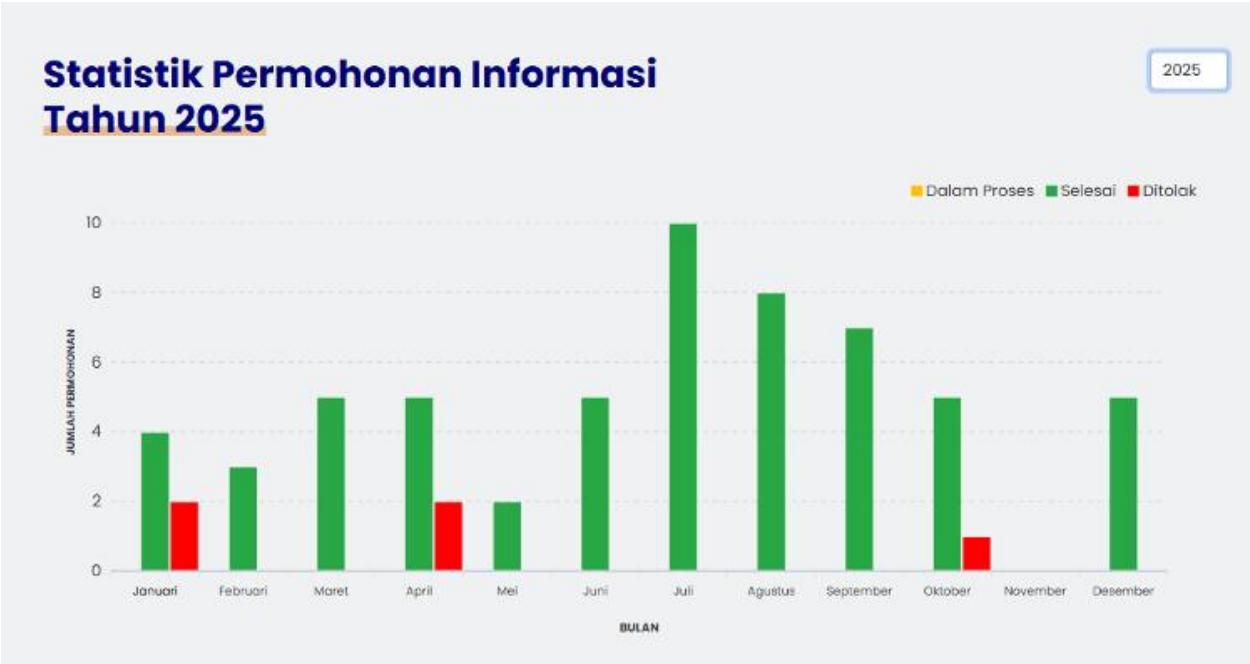
No	Bulan	Jumlah Permintaan Informasi
1	Januari	6
2	Februari	3
3	Maret	5
4	April	7
5	Mei	2
6	Juni	5
7	Juli	10
8	Agustus	8
9	September	7
10	Oktober	6
11	Nopember	0
12	Desember	5
Jumlah		64

3.2 Waktu yang diperlukan

Waktu yang diperlukan dalam pelayanan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, tentang Standar Layanan Informasi Publik. Jawaban atas permohonan informasi publik wajib diberikan oleh Badan Publik paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap. Dapat diperpanjang 7 hari kerja apabila informasi yang diminta bersifat kompleks (diberitahukan kepada pemohon secara tertulis sebelum batas 10 hari kerja).

3.3 Jumlah Permintaann Informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Dari 64 permintaan informasi yang masuk melalui website PPID Kabupaten Buleleng, sejumlah 59 informasi seluruhnya diberikan kepada masyarakat dan untuk 5 permintaan informasi ditolak, dikarenakan spam.



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara

3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

PPID Kabupaten Buleleng tidak pernah menolak permintaan informasi yang diajukan masyarakat, kecuali Informasi yang diajukan itu termasuk Informasi Dikecualikan. Selain itu, ada beberapa permintaan informasi yang diajukan masyarakat tergolong spam, seperti pada gambar di bawah

Detail Permohonan Informasi Publik

Dashboard > Permohonan > Informasi Publik > Detail Permohonan

Detail Permohonan

PERM/CMA/0025

I. STATUS PERMOHONAN

No. Permohonan

PERM/CMA/0025

Tanggal Permohonan

17 Oktober 2025

Status

Revisi

Alasan

Data diri dan data identifikasi tidak valid, permohonan spam.

II. DATA PERMOHONAN

Nama Lengkap

Alamat

Provinsi

No. Telp/HP

Email

*****@gmail.com

Tanda Tangan

LINE 1 1

Surat dan Stempel

LINE 1 1

III. DETAIL PERMOHONAN

Indikasi Tindakan Permohonan

Tindakan Data dan Informasi Buleleng

Indikasi Permohonan Informasi

Tindakan Data dan Informasi Buleleng

Tujuan Pengajuan Informasi

Isi dan Informasi yang Ditanyakan

IV. AKSI

Revisi

Revisi

Detail Permohonan

PERM/CMA/0025

I. STATUS PERMOHONAN

No. Permohonan

PERM/CMA/0025

Tanggal Permohonan

18 April 2025

Status

Revisi

Alasan

Permohonan spam, tidak memenuhi syarat, dan data diri tidak valid.

II. DATA PERMOHONAN

Nama Lengkap

Alamat

Provinsi

No. Telp/HP

Email

*****@gmail.com

Tanda Tangan

LINE 1 1

III. DETAIL PERMOHONAN

Indikasi Tindakan Permohonan

Tindakan Data dan Informasi Buleleng

Indikasi Permohonan Informasi

Tindakan Data dan Informasi Buleleng

Tujuan Pengajuan Informasi

Isi dan Informasi yang Ditanyakan

IV. AKSI

Revisi

Revisi

Revisi



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

4.1 Jumlah Keberatan yang Diterima

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng.

4.2 Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan Pelaksanaannya

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng.

4.3 Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi yang Berwenang

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng.

4.4 Hasil Mediasi dan atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi yang Berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng.

4.5 Jumlah Gugatan yang diajukan ke Pengadilan

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng.

4.6 Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng.

BAB V

KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Buleleng tentu belum berjalan sempurna dan masih menghadapi kendala. Hal tersebut yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik selama ini. Kendala-kendala ini perlu untuk diidentifikasi dan dikelola dengan baik untuk memastikan pelayanan informasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Beberapa kendala baik secara eksternal maupun internal yang dihadapi, diantaranya

1) Kurangnya Pemahaman SDM terkait PPID

Sebagian SDM yang bertugas belum sepenuhnya memahami peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini menyebabkan kurangnya responsivitas dan kualitas pelayanan informasi. Pemahaman yang terbatas ini juga memengaruhi kemampuan petugas dalam mengelola informasi, menangani sengketa informasi, dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan.

2) Kendala Pemuktahiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)

Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya pemahaman SDM terhadap klasifikasi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan. Banyak PPID Pelaksana yang belum memahami dengan baik batasan antara informasi yang wajib dibuka dan informasi yang bersifat rahasia. Akibatnya, beberapa informasi yang seharusnya dapat diakses oleh publik justru tidak tersedia, atau sebaliknya, informasi yang seharusnya dikecualikan malah diumumkan secara terbuka.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah

1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a) Melaksanakan pelatihan kepada PPID Pelaksana Lingkup Pemkab Buleleng mengenai pengelolaan informasi publik dan tugas PPID
2. Penguatan Koordinasi Antar Unit Kerja
 - a) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memperjelas alur koordinasi antar unit kerja
 - b) Melakukan percepatan penyelesaian permohonan informasi
 - c) Melaksanakan evaluasi berkala antar unit kerja mengenai pelayanan informasi
3. Sosialisasi dan Edukasi
 - a) Melaksanakan program literasi informasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai Keterbukaan Informasi Publik
 - b) Memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan sosialisasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik

BAB VII

PENUTUP

Transparansi dan keterbukaan informasi merupakan pondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Dalam konteks ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat. Sepanjang periode pelaporan ini, PPID telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, dengan tetap mengacu pada prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Secara umum, pelayanan informasi yang dilakukan telah menunjukkan perkembangan yang positif. Permintaan informasi publik yang diterima oleh PPID dapat dipenuhi dalam waktu yang telah ditentukan, dan disertai dengan dokumentasi yang jelas. Namun demikian, pelaksanaan layanan informasi publik tidak lepas dari berbagai tantangan. Masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pengelolaan arsip informasi, serta perlunya peningkatan pemahaman internal terhadap pentingnya pelayanan informasi. Hal ini menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan.

Sebagai penutup, kami menyadari bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari semangat demokrasi yang menjamin hak warga negara untuk tahu. Oleh karena itu, komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik harus menjadi bagian dari budaya kerja PPID. Dengan dukungan semua pihak, baik dari internal lembaga maupun masyarakat sebagai pengguna informasi, kami optimis bahwa pelayanan informasi publik ke depan akan menjadi lebih baik, lebih transparan, dan lebih berdampak.



LAMPIRAN

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN JANUARI

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	INSTANSI TUJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA	Keterangan
1	PI/E59000/I/2025	Komang Diana Paramitha Dewi	02-01-2025	Dinas Kesehatan	1. Data Jumlah Pasien DM di Kabupaten Buleleng tahun 2022-2024 2. Data Jumlah Pasien DM Tipe 2 Yang Mengalami Kaki Diabetik di RSUD Kabupaten Buleleng dan Puskesmas Buleleng 1 Tahun 2022-2024 3. Meminta surat tembusan untuk melakukan studi pendahuluan ke Puskesmas Buleleng 1 dan RSUD Kabupaten Buleleng	Permohonan sudah selesai
2	PI/07F14C/I/2025	Komang Diana Paramitha Dewi	03-01-2025	Rumah Sakit Umum Daerah	1. Data Jumlah Pasien DM Tipe 2 tahun 2022-2024 2. Data jumlah pasien yang mengalami kaki diabetik 2022-2024	Permohonan sudah selesai
3	PI/82E369/I/2025	Luh Yunita Damayanti	15-01-2025	Rumah Sakit Umum Daerah	Surat Keterangan Operasi bapak saya atas nama I Made Siara pada tanggal 30 November 2024 dan 4 Desember 2024	Permohonan sudah selesai
4	PI/B31615/I/2025	Dian Amalia Putri	16-01-2025	Dinas Kesehatan	rincian data tentang jumlah balita gizi kurang dan jumlah macam-macam pekerjaan orang tua, di wilayah kerja Puskesmas Gerokgak 1 Kabupaten Buleleng	Permohonan sudah selesai
5	PI/B870F0/I/2025	Putu Adi Bawa	16-01-2025	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Data observasi dan Data Penelitian	Ditolak, belum melengkapi surat ijin penelitian
6	PI/DA2DE5/I/2025	Putu Surya Ardi Bhuana	21-01-2025	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Data pengujian keamanan dan performa website	Ditolak, belum melengkapi surat ijin penelitian

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN FEBRUARI

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	INSTANSI TUJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA	Keterangan
1	PI/A62FC9/II/2025	Komang Maresta Rustikayanthi	03-02-2025	Dinas Kesehatan	Data pasien hipertensi di Puskesmas Buleleng II	Permohonan sudah selesai
2	PI/6ED168/II/2025	Putu Wikrama Windhu	04-02-2025	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Mohon informasi terkait aplikasi PPID kabupaten Buleleng	Permohonan sudah selesai
3	PI/D72E0D/II/2025	Ida Bagus Ketut Asmara Wibawa	24-02-2025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Mengubah KK lama ke KK baru (barcode)	Permohonan sudah selesai

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN MARET

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	INSTANSI TUJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA	Keterangan
1	PI/1DDF35/III/2025	Ni Made Evita Putri Indrawati	11-03-2025	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rincian dibutuhkan untuk data stunting di setiap desa yang ada di buleleng tahun 2024/2025 dan data angka pernikahan dini di buleleng 2024/2024	Permohonan sudah selesai
2	PI/F66EB9/III/2025	Putu Dini Wina Wahyuni	17-03-2025	Dinas Kesehatan	Data dan angka kejadian anemia pada remaja putri di kabupaten singaraja serta prevalensi konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri di singaraja khususnya di SMA Negeri 1 Singaraja	Permohonan sudah selesai
3	PI/17DEA6/III/2025	Ni Putu Mirah Kartika Cahyani	18-03-2025	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1. Penetapan Konteks Risiko SPBE - Siapakah unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SPBE di Diskominfo Buleleng? - Apa saja fungsi dan tugas utama unit tersebut? - Untuk periode waktu berapa lama Manajemen Risiko SPBE akan dilaksanakan?	Permohonan sudah selesai

					2. Identifikasi Sasaran SPBE - Apa sasaran utama Diskominfo Buleleng dalam mendukung penerapan SPBE? - Apa sasaran spesifik yang ingin dicapai dalam penerapan SPBE di Diskominfo Buleleng? - Indikator apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penerapan SPBE? - Berapa target kinerja yang ingin dicapai untuk setiap indikator SPBE? - Apakah terdapat dokumen perencanaan, seperti rencana kerja, yang dapat dipelajari untuk memahami sasaran dan target SPBE di Diskominfo Buleleng? 3. Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE - Siapa yang bertanggung jawab sebagai Pemilik Risiko SPBE, Koordinator Risiko SPBE, dan Pengelola Risiko SPBE di Diskominfo Buleleng? 4. Pemangku Kepentingan - Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam penerapan SPBE di Diskominfo Buleleng, baik dari internal instansi, instansi pemerintah lain, maupun pihak eksternal seperti perguruan tinggi atau masyarakat? - Bagaimana peran atau hubungan masing-masing pihak dalam mendukung penerapan SPBE? 5. Peraturan Perundang-Undangan Selain Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020, apakah terdapat peraturan perundang-undangan lain, seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, yang menjadi acuan Diskominfo Buleleng dalam penerapan SPBE?	
--	--	--	--	--	---	--

					6. Kategori Risiko SPBE Berdasarkan pengalaman Diskominfo Buleleng, kategori risiko apa saja yang paling sering dihadapi atau memiliki dampak signifikan dalam penerapan SPBE, seperti risiko infrastruktur, keamanan data, atau ketersediaan layanan?	
4	PI/35F1CC/III/2025	Komang Sri Ayu Rejeki	25-03-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Seputar Layanan TI	Permohonan sudah selesai
5	PI/7983E1/III/2025	Ni Luh Putu Anggie Adnyani	25-03-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	informasi layanan TI	Permohonan sudah selesai

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN APRIL

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	INSTANSI TUJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA	Keterangan
1	PI/231949/IV/2025	I Gede Sadia Dana	02-04-2025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengajuan Online	Permohonan sudah selesai
2	PI/465C3A/IV/2025	xxxxx	05-04-2025	Pemerintah Kabupaten Buleleng	xxxxxxx	Permohonan spam, identitas dan detail permohonan bukan data yang valid
3	PI/4327AF/IV/2025	ahmar	05-04-2025	Sekretariat DPRD	cccccccc	Permohonan spam, identitas dan detail permohonan bukan data yang valid

4	PI/E32E81/IV/2025	Ketut Espana Giri, S.ST., M.Kes	15-04-2025	Rumah Sakit Umum Daerah	1. Data kumulatif anak HIV/AIDS yang berobat di RSUD Buleleng hingga tahun 2024 2. Data tes HIV pada anak di RSUD Buleleng tahun 2023-2024 3. Data cakupan pengobatan pada anak positif HIV di RSUD Buleleng tahun 2023-2024 4. Data anak AIDS yang dirawat di RSUD Buleleng tahun 2023-2024 5. Data anak yang meninggal akibat terkait HIV/AIDS di RSUD Buleleng tahun 2023-2024	Permohonan sudah selesai
5	PI/47A1AB/IV/2025	I Kadek Dandy Kusuma	16-04-2025	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Informasi yang dibutuhkan adalah pengumpulan data berupa wawancara untuk keperluan skripsi dengan pihak Kominfosanti Kabupaten Buleleng	Permohonan sudah selesai
6	PI/1284E6/IV/2025	I Gst Ayu Nyoman Suci	21-04-2025	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1. Data yang diperoleh dari hasil wawancara/kuisisioner tentang Manajemen Risiko kepada Dinas Kominfosanti 2. Daftar Pegawai Diskominfosanti/Struktur Organisasi 3. Informasi terkait laporan risiko yang pernah terjadi (Data Kejadian Risiko) di Diskominfosanti (wawancara/dokumen) 4. SOP pelayanan Diskominfosanti 5. Informasi tentang proses Manajemen Risiko (Identifikasi, Analisis, Penilaian serta Pengendalian Risiko) sesuai SOP yang diterapkan	Permohonan sudah selesai
7	PI/71B535/IV/2025	Luh Made Anindita Adristi Soeka	21-04-2025	Dinas Kesehatan	1. Data anemia remaja di masing-masing wilayah kerja puskesmas se kabupaten buleleng 2. Data statistik kesehatan dasar kabupaten buleleng 2023-2024	Permohonan sudah selesai

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN MEI

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	INSTANSI TUJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA	Keterangan
1	PI/C0CD86/V/2025	Putu Lina Putri Prapatti	21-05-2025	Dinas Kesehatan	Data Stunting per desa yang ada di Puskesmas Banjar 1	Permohonan sudah selesai
2	PI/7B142A/V/2025	Reynaldus Yoseph Maria Neto Labamaking	23-05-2025	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Data pengguna aplikasi E-Surat dan Tampilan Aplikasi E-Surat	Permohonan sudah selesai

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN JUNI

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	INSTANSI TUJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA	Keterangan
1	PI/CA49B6/VI/2025	Thoriq Zaidan Mizardie	02-06-2025	Dinas Pariwisata	Selamat siang Yth. Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, saya Thoriq Zaidan Mizardie mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember program studi Studi Pembangunan mendapat tugas mata kuliah TIK dalam pembangunan, oleh karena itu, Dengan hormat, saya membutuhkan informasi terkait: 1. Data jumlah kunjungan wisata ke Buleleng per tahun dan; 2. Program digitalisasi promosi wisata Yang akan saya gunakan untuk tugas mata kuliah TIK dalam Pembangunan dan penelitian dengan topik Pariwisata Berkelanjutan dengan Digitalisasi. Terima kasih atas perhatiannya.	Permohonan sudah selesai

2	PI/2B0D15/VI/2025	I Nyoman Ganendra Sunu Susila	08-06-2025	Dinas Pertanian	apakah ada informasi mengenai jumlah atau data tentang limbah limbah yang dii hasilkan oleh pertanian di buleleng dan secara rinci limbah apa saja yang di hasilkan serta berapa perser pengaruh limbah pertanian terhadap lingkungan.	Permohonan sudah selesai
3	PI/04043B/VI/2025	I Nyoman Ganendra Sunu Susila	11-06-2025	Dinas Lingkungan Hidup	saya memerlukan data tentang limbah pertanian dan perternakan yang dimana berapa jumlah limbah yang di hasilkan dari pertanian dan peternakan dan apa saja limbah limbah yang di hasilkan dari pertanian dan peternakan.	Permohonan sudah selesai
4	PI/4B6C74/VI/2025	Putu Diah Asrida, SE., M.Si.,Ak.,CA	24-06-2025	Dinas Kesehatan	Data penelitian	Permohonan sudah selesai
5	PI/7C2AC9/VI/2025	Gede Dandy Ganda Mahendra	26-06-205	Dinas Kesehatan	1. Tinggi badan menurut umur (TB/U) 2. Berat Badan 3. Jenis Kelamin 4. Status Gizi 5. Jumlah anak yang tergolong Stunting dan tidak	Permohonan sudah selesai

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN JULI

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	INSTANSI TUJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA	Keterangan
1	PI/FCE7F7/VII/2025	I Kadek Bima Diksatriadi	04-07-2025	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Data anak magang yang pernah magang di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Format Data yang dibutuhkan sebagai berikut : Nama, Asal Sekolah/Universitas, Tahun Magang dan Alamat (Jika ada)	Permohonan sudah selesai
2	PI/44D660/VII/2025	Ida Ayu Putu Wulandari	10-07-2025	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Untuk memperoleh jawaban responden pada kuesioner penelitian	Permohonan sudah selesai
3	PI/FFA4ED/VII/2025	Welzeen Sinaga	14-07-2025	Dinas Kesehatan	Data Status Gizi Balita dan Balita Stunting pada tahun 2024 atau 2025. Meliputi Umur Balita (saat diukur), Tinggi Badan, Berat Badan, Status Gizi, Jenis Kelamin dan status Stunting	Permohonan sudah selesai
4	PI/E2C4F7/VII/2025	Putu Dian Prima Kusuma Dewi	15-07-2025	Dinas Kesehatan	Data agregat terkait jumlah dan insiden penyakit HIV/AIDS, Jumlah Kasus HIV/AIDS pada anak, Jumlah kasus loss To follow up pada layanan terapi ARV, jumlah atau presentase ODHIV dalam pengobatan terapi ARV, dan angka kualitas hidup ODHIV yang terdata.	Permohonan sudah selesai
5	PI/2D9841/VII/2025	Ni Made Karlina Sumiari Tangkas	16-07-2025	Dinas Kesehatan	Data Praktisi kesehatan tradisional Kecamatan Buleleng dan Kecamatan Kubutambahan	Permohonan sudah selesai
6	PI/F1690E/VII/2025	Nabila Safitri	18-07-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Meminta izin penelitian	Permohonan sudah selesai
7	PI/310881/VII/2025	Budhi Dindia Ayu Divanya	25-07-2025	Dinas Kesehatan	Data Tingkat depresi remaja se kabupaten buleleng, per kecamatan. Data 1 tahun terakhir	Permohonan sudah selesai

8	PI/AB5F5D/VII/2025	Budhi Dindia Ayu Divanya	25-07-2025	Dinas Kesehatan	Data mengenai tingkat depresi pada remaja se kabupaten buleleng, data diminta dalam bentuk per kecamatan. Data 1 tahun terakhir, dan kejadian bunuh diri remaja di kabupaten buleleng	Permohonan sudah selesai
9	PI/1A7A55/VII/2025	Ida Ayu Rat Regita Cahyani	28-07-2025	Sekretariat DPRD	Informasi pembayaran verifikasi di DPRD	Permohonan sudah selesai
10	PI/FCE624/VII/2025	I Gst Ayu Made Kartika Dwi Utami Pinatih	28-07-2025	Sekretariat DPRD	observasi awal mengenai Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah DPRD Kabupaten Buleleng	Permohonan sudah selesai

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN AGUSTUS

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	INSTANSI TUJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA	Keterangan
1	PI/087565/VIII/2025	Ni Putu Megi Tantui Apriliyani	05-08-2025	Dinas Kesehatan	Data penderita hipertensi usia produktif umur (18-64) dengan data tahun 2023-2024 dan data tingkat stres usia produktif pada tahun 2024	Permohonan sudah selesai
2	PI/35D192/VIII/2025	Komang Wiratni	05-08-2025	Dinas Kesehatan	Data Penderita Diabetes pada semua usia dari tahun 2023 - 2024	Permohonan sudah selesai
3	PI/EF5157/VIII/2025	Desak Putu Diah Putri Maheswari	05-08-2025	Dinas Kesehatan	Data Tingkat Stres pada remaja dewasa 2023- 2024 Data Gangguan siklus menstruasi pada wanita remaja dewasa Tahun 2023- 2024	Permohonan sudah selesai
4	PI/D9F69B/VIII/2025	Ida Ayu Putu Ratih Pradnya Dewi	05-08-2025	Dinas Kesehatan	1. Data kehamilan dini pada remaja 2023-2024 2. Data infeksi menular seksual remaja tahun 2023-2024	Permohonan sudah selesai

5	PI/98B582/VIII/2025	Ida Ayu Putu Ratih Pradnya Dewi	05-08-2025	Dinas Kesehatan	1. Data kehamilan dini pada remaja 2023-2024 2. Data infeksi menular seksual remaja tahun 2023-2024	Permohonan sudah selesai
6	PI/9D55FE/VIII/2025	Ayu Ermawati	07-08-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Data mengenai program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng selama dua tahun terakhir, termasuk program ketahanan pangan dan pengelolaan perikanan	Permohonan sudah selesai
7	PI/82FEEC/VIII/2025	Ketut Agus Adi Pratama	07-08-2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Peraktek kerja lapangan	Permohonan sudah selesai
8	PI/4AD6BC/VIII/2025	I Gusti Ayu Made Kartika Dwi Utami Pinatih	13-08-2025	Sekretariat DPRD	Permohonan permintaan jurnal pencatatan laporan keuangan yang mengalami kesalahan tahun 2024	Permohonan sudah selesai

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN SEPTEMBER

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	INSTANSI TUJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA	Keterangan
1	PI/59FF30/IX/2025	Ni Putu Mirah Kartika Cahyani	09-09-2025	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1. Profile Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng 2. Visi dan Misi 3. Struktur Organisasi	Permohonan sudah selesai
2	PI/F09C64/IX/2025	Ketut Espana Giri	12-09-2025	Dinas Kesehatan	Data penelitian dengan wawancara pada pemegang program HIV/AIDS	Permohonan sudah selesai
3	PI/AB1855/IX/2025	Nitya Difa Kumaralalita	13-09-2025	Dinas Kesehatan	Jumlah ibu yang memiliki bayi berusia 6 - 12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Sukasada 1 Kabupaten Buleleng	Permohonan sudah selesai
4	PI/10DB8E/IX/2025	Made Ila Miranda Hary	13-09-2025	Dinas Kesehatan	1. Data pendidikan masyarakat di kecamatan sukasada 2. Data kesehatan balita di kecamatan	Permohonan sudah selesai

					sukasada 3. Jumlah anak usia 12-23 bulan bulan juli 2025	
5	PI/DB6ED7/IX/2025	Ni Putu Eka Maharani	16-09-2025	Dinas Kesehatan	Data ODHA di Wilayah Kerja Dinkes Buleleng Terkhusus di Wilayah Kerja Puskesmas Buleleng 1 Data ODHA yang Menjalani Terapi ARV minimal 3 bulan	Permohonan sudah selesai
6	PI/F3A8D0/IX/2025	Ni Putu Mirah Kartika Cahyani	18-09-2025	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Rincian Informasi yang Dibutuhkan: 1. Dokumen Renstra Diskominfosanti 2. Dokumen Standar Pelayanan Diskominfosanti	Permohonan sudah selesai
7	PI/29A2DD/IX/2025	Luh Nik Armini	24-09-2025	Dinas Kesehatan	Permohonan Pengambilan Data Sekunder Sigizikesga	Permohonan sudah selesai

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN OKTOBER

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	INSTANSI TUJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA	Keterangan
1	PI/6D096D/X/2025	I Wayan Adi Aryanta	07-10-2025	Dinas Kebudayaan	LHKPN Kepala Dinas	Permohonan sudah selesai
2	PI/D5C08E/X/2025	sdasd	07-10-2025	Sekretariat Daerah	asd	Data diri dan bukti identitas tidak valid, permohonan spam.
3	PI/11C78A/X/2025	M. Rifhal Julian	09-10-2025	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Informasi terkait Skor IMDI Buleleng tahun 2025 yang mencakup: 1. Strategi Buleleng dalam meningkatkan skor IMDI Buleleng 2025 2. Inovasi/program unggulan yang dilakukan oleh Pemda/stakeholder yang mendukung tercapainya skor IMDI 2025	Permohonan sudah selesai

					3. Faktor/indikator apa saja yang mendorong nilai IMDI Buleleng 2025 4. Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan skor IMDI Buleleng	
4	PI/BB1B54/X/2025	Putu Winda Kusuma Devi Yanti	09-10-2025	Dinas Kesehatan	data bayi usia 0-2 bulan di pukesmas sukasada 1	Permohonan sudah selesai
5	PI/0DEF70/X/2025	Ni Putu Dheavani Wulan Sawitri	13-10-2025	Dinas Kesehatan	Permohonan melakukan studi pendahuluan di Puskesmas I Buleleng, Puskesmas I Sawan dan Puskesmas I Seririt	Ditolak, belum melengkapi surat ijin penelitian
6	PI/4F094F/X/2025	Ni Putu Mirah Kartika Cahyani	30-10-2025	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Evaluasi hasil kuesioner dengan representatif kominfosanti	Ditolak, belum melengkapi surat ijin penelitian

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN NOVEMBER

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	INSTANSI TUJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA	Keterangan
Tidak ada permohonan informasi yang masuk						

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN DESEMBER

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	INSTANSI TUJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA	Keterangan
1	PI/0F22D8/XII/2025	Kadek Ferdian Dwi Arsa	09-12-2025	Satuan Polisi Pamong Praja	jumlah anggota satuan polisi pamong praja	Permohonan sudah selesai
2	PI/8CF554/XII/2025	Call Centerr	14-12-2025	Bagian Umum	Cara Membatalkan Pengajuan Pinjaman Easycash.?	Permohonan sudah selesai
3	PI/64C4A1/XII/2025	Ida Ayu Rayte Hervanders Putri	15-12-2025	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Membutuhkan informasi demografi pengguna dan intensitas digital ttg 1.presentasi kepuasan pengguna medsos thn 2024 2.Grafik/Bagan perbandingan pilar literasi ttg isu soft skills versus hard skills 3. Analisis konten tematik (hastag) ttg kategori konten, jumlah tweet, presntase implikasi temuan. Data yg diminta kritik berbasis dakta/data, narasi disinformasi, ujaran kebencian dan ajakan partisipasi 4. Data perbandingan skor pilar literasi digital nasional ttg skor kecakapan digital, etika digital, keamanan digital dan budaya digital	Permohonan sudah selesai
4	PI/AE1B24/XII/2025	Gede Angga Pratama	17-12-2025	Dinas Komunikasi, Persandian dan Statistik	Permohonan Data Jumlah siaran (channel) yang diterima di wilayah kab buleleng.	Permohonan sudah selesai
5	PI/521E27/XII/2025	Zafrullah Munir	30-12-2025	RSUD	riwayat informasi medis pasien	Permohonan sudah selesai

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Buleleng
Made Suharta, S.Kom, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197308092003121003